

**KARTU NOMOR  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO**

NOMOR PERBUP : 65 TAHUN 2023

TANGGAL PERBUP : 06-07-2023

JUDUL PERBUP : Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Bupati Purworejo Nomor 131  
Tahun 2021 Tentang Rencana  
Strategis Dinas Perhubungan  
Kabupaten Purworejo Tahun  
2021-2027

DINAS/OPD : BAPPEDALITBANG

TGL PENGUNDANGAN : 06-07-2023

BERITA DAERAH TAHUN 2023 NO 65 SERI E NO 51

Lembar untuk OPD Pemrakarsa



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

84



- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 131 Seri E Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 35 Seri E Nomor 31).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan angka 1.1 dan 1.2, Tabel 1.1 Bab I, angka 5.2 dan tabel T-C.27 Bab VI dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 131 Seri E Nomor 61) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

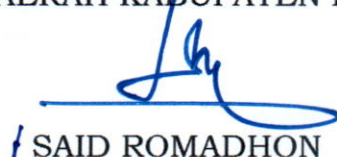
Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal

♣ BUPATI PURWOREJO ♣

  
♣ AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal

♣ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

  
♣ SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN                      NOMOR                      SERI                      NOMOR

84

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
PURWOREJO NOMOR 131 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS  
PERHUBUNGAN                   KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2021-2026



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

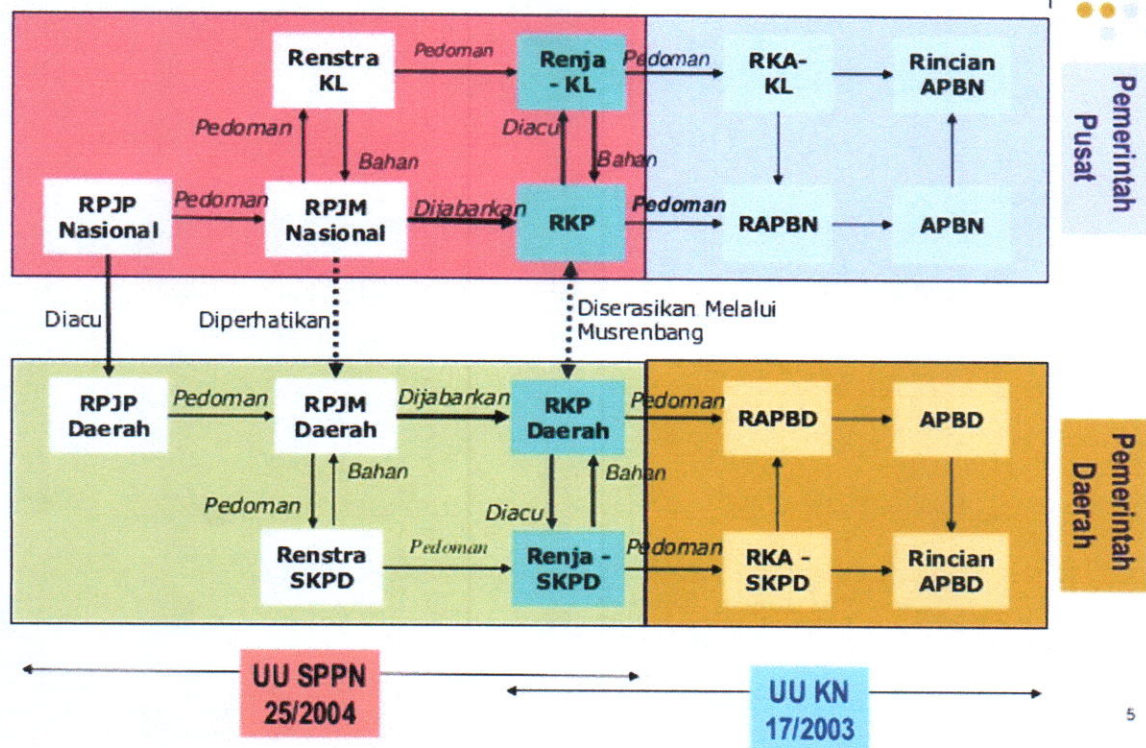
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada penambahan beberapa Sub Kegiatan. Hal tersebut tentunya harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 ini tetap berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga tetap berpedoman pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Selanjutnya, Renstra yang merupakan rencana jangka menengah dijabarkan melalui Rencana Tahunan / Rencana Jangka Pendek dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



## ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 tetap berpedoman pada langkah – langkah penyusunan Renstra sebagai berikut :

### 1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah meliputi:

- Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pembahas Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026;
- Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun dan Tim Pembahas;
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



2. Penyusunan dan Pembahasan Perubahan Kedua Renstra

Pembahasan Perubahan Kedua Renstra dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang dan Bagian Hukum Setda serta dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan Perubahan Kedua Renstra bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah. Hasil pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

3. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 menjadi rancangan akhir Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4. Penetapan

Rancangan akhir Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 disampaikan kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila pada hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian,

Bappedalitbang dapat menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Tahapan Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

*Tabel 1.1*  
**Agenda Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan  
Kab. Purworejo Tahun 2021 – 2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Perubahan Renstra PD menyesuaikan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	23 Juni 2023
2.	Penyusunan SK Tim Penyusun dan Pembahas Perubahan Renstra	26 Juni 2023
3.	Penyusunan dan pembahasan Perubahan Kedua Renstra	26 – 27 Juni 2023
4.	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah	3 – 4 Juli 2023
5.	Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Kedua Renstra	5 Juli 2023
7.	Penetapan Perubahan Kedua Renstra	6 Juli 2023

**1.2 LANDASAN HUKUM**

Memuat tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 2020 tentang Renstra Kemenhub Tahun 2020 – 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
25. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusun program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja SKPD.

Pada Urusan Perhubungan didukung 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini mendukung program unggulan **Purworejo Padhang** dengan rencana implementasi Pembangunan PJU melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. *Purworejo Padhang* atau *Purworejo Terang* adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kabupaten. PJU merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari. Pada RTRW, program ini memiliki keterkaitan terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kawasan rawan pada sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag serta kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA. Program ini juga terkait dengan percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan, serta pengembangan dan pemantapan PPL dalam konteks perwujudan struktur ruang pada sistem perkotaan.

#### 5.1 RENCANA PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.



2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  
Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas.

## **5.2 KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

#### **c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Alat Besar
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

**a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

**b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

**c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

- 2) Pembangunan Gedung Terminal
- 3) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
- 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- 5) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
- 6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

**d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

**e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 8) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



**f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 5) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 6) Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- 7) Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- 8) Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
- 9) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

**g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

**h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Sub Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

**i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**j. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

**k. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :



Tabel T-C.27  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. PURWOREJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan																	
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81.50%		82.50%		83.50%		84.50%		86.50%									
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81.50%		82.50%		83.50%		84.50%		86.50%								
			2.15	URUSAN PERHUBUNGAN					18,789,252,625		14,775,679,539		16,188,513,131		16,625,723,622		16,620,557,462				74,341,709,775.00			
			2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100%	100%	100%	3,710,252,625	100%	3,865,679,539	100%	4,248,513,131	100%	4,363,723,622	100%	4,386,587,462	100%			11,916,709,775.00		
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
			2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	12	7	48,655,200	7	54,000,000	7	44,849,500	7	50,756,950	7	56,725,300	35	dokumen		244,063,950.00		
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	12	7		7		7		7		7		35	dokumen				
			2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14 dokumen	12 dokumen	15	36,459,800	15	40,000,000							30	dokumen		76,459,800.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14 dokumen	12 dokumen	15				15	30,000,000	15	35,000,000	16	40,000,000	61	dokumen		105,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		-	1	2,312,000	1	2,500,000							2	dokumen		4,812,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		-					1	2,625,000	1	2,756,250	1	2,894,000	3	dokumen		8,275,250.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		-	1	2,512,000	1	3,000,000							2	dokumen		5,512,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0003	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		-					1	3,150,000	1	3,307,500	1	3,472,800	3	dokumen		9,930,300.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.04	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		-	1	629,700	1	650,000							2	dokumen		1,279,700.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		-					1	682,500	1	716,600	1	752,000	3	dokumen		2,151,100.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.05	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		-	1	829,700	1	850,000							2	dokumen		1,679,700.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0005	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		-					1	892,000	1	936,600	1	983,000	3	dokumen		2,811,600.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		-	16	3,483,900	16	4,000,000							32	laporan		7,483,900.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		-					16	4,200,000	16	4,410,000	16	4,630,500	48	laporan		13,240,500.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		-	6	2,428,100	6	3,000,000							12	dokumen		5,428,100.00	Dinhub	
			2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		-					6	3,300,000	6	3,630,000	6	3,993,000	18	dokumen		10,923,000.00	Dinhub	

2



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan																	
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
			2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	2,789,738,325	100	2,576,902,620	100	2,717,184,431	100	3,249,207,472	100	3,288,072,962	100 %	2,951,414,325.00	Dinhub			
					Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100 %					
			2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	12 bulan	12 bulan	45	2,758,066,425	45	2,542,064,620							90 Orang / bulan	2,758,066,425.00	Dinhub			
			2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	12 bulan	12 bulan					45	2,678,834,431	45	3,207,055,472	45	3,241,706,962	135 Orang / bulan	0.00	Dinhub			
			2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	6	7,999,900	6	8,799,000							12 laporan	16,798,900.00	Dinhub			
			2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-					6	9,678,000	6	10,645,800	6	11,710,000	18 laporan	32,033,800.00	Dinhub			
			2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	14 dokumen	12 dokumen	26	23,672,000	26	26,039,000							52 laporan	49,711,000.00	Dinhub			
			2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	14 dokumen	12 dokumen					26	28,642,000	26	31,506,200	26	34,656,000	78 laporan	94,804,200.00	Dinhub			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	1	35,301,719	1	36,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	4 %	108,000,000.00				
					Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
			2.15.01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen				0	1	35,301,719							1 Laporan	35,301,719.00				
			2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen							1	36,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	3 Laporan	108,000,000.00				
			2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					226,227,200		245,770,200	100%	247,725,200	100	249,874,200	100	252,238,200	100 %	529,380,600.00				
					Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									100		100		100 %						
			2.15.01.2.05.02	Pengadaan Paknias Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paknias Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	45	96,227,200	45	96,227,200							90 Paket	0.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Paknias Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paknias Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-					45	96,227,200	45	96,227,200	45	96,227,200	135 Paket	288,681,600.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-			20	19,543,000							20 Orang	19,543,000.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-					20	21,498,000	20	23,647,000	20	26,011,000	60 Orang	71,156,000.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	50	10,000,000	50	10,000,000							100 Orang	0.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-					50	10,000,000	50	10,000,000	50	10,000,000	150 Orang	30,000,000.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	55	120,000,000	55	120,000,000							110 Orang	120,000,000.00	Dinhub			
			2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-					55	120,000,000	60	120,000,000	60	120,000,000	175 Orang	360,000,000.00	Dinhub			
			2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	249,085,300	100	209,466,000	100	229,410,000	100	253,255,000	100	275,179,000	100 %	1,209,719,300.00	Dinhub			
					Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100 %					



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan																	
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
			2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				4,000,000	1	5,493,000							1	Paket	5,493,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket								1	6,042,000	1	6,646,000	1	7,311,000	3	Paket	19,999,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										1	2,000,000			1	Paket	2,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	7,416,000	2	8,179,000								3	Paket	15,595,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket								2	8,997,000	2	9,897,000	2	10,887,000	6	Paket	29,781,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket								11	6,930,000	11	6,930,000	11	6,930,000	33	Paket	20,790,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	10,310,000	1	13,409,000								3	Paket	23,719,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket								1	14,749,000	1	16,225,000	1	17,847,000	3	Paket	48,821,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12	2,676,000	12	2,943,000								24	Dokumen	2,943,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen								12	3,237,000	12	3,562,000	12	3,918,000	36	Dokumen	10,717,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			1	9,093,300	1	9,996,000								2	Paket	19,089,300.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket								1	10,995,000	1	12,095,000	1	13,304,000	3	Paket	36,394,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	215,590,000	12	149,446,000								24	Laporan	365,036,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 bulan	12 bulan						12	157,460,000	12	173,900,000	12	191,982,000	36	Laporan	523,342,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					4	20,000,000								4	Dokumen	20,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen								4	21,000,000	4	22,000,000	4	23,000,000	12	Dokumen	66,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		1		125,000,000		250,000,000	3 jenis	625,000,000	1 jenis	150,000,000	-	75,000,000	4	jenis	4,105,000,000.00			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis																		
			2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	250,000,000								1	unit	500,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit														0	unit		Dinhub	
			2.15.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit														0	unit	1,500,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit								1	500,000,000					1	unit	1,500,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit														0	unit		Dinhub	
			2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit								5	50,000,000					5	unit	100,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4 unit	5	50,000,000										5	unit	100,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4 unit						8	75,000,000			8	75,000,000	16	unit	100,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1.00	75,000,000										1	unit	100,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit														1	unit		Dinhub	
			2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										5	50,000,000			5	unit	5,000,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										1	100,000,000			1	unit	200,000,000.00	Dinhub	



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan																
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12 bulan	12 bulan	2	157,352,400	2	166,360,000	2	105,996,000	2	116,595,000	2	128,255,000	10	laporan	674,558,400.00		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12 bulan	12 bulan	2		2		2		2		2		10	laporan			
			2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	87,600,000	12	96,360,000							36	Laporan	183,960,000.00	Dinhub	
			2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 bulan	12 bulan				12	105,996,000	12	116,595,000	12	128,255,000	48	Laporan	350,846,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	69,752,400	12	70,000,000						36	Laporan	139,752,400.00	Dinhub		
			2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	12 bulan	12 bulan				12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	48	Laporan	210,000,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	3 jenis	3 jenis	3	114,194,200	3	327,879,000	3	242,378,000	3	258,035,000	3	275,087,000	3	jenis	2,202,573,200.00		
					Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	jenis	3 jenis	3 jenis	3		3		3		3		3		3	jenis			
			2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8 unit	9 unit	9	54,171,000	9	95,265,000						53	unit	149,436,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8 unit	9 unit				22	104,792,000	22	115,271,000	22	126,798,000	75	unit	346,861,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 unit	46 unit	46	23,348,000	41	33,164,000						162	unit	56,512,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 unit	46 unit				58	33,164,000	58	33,164,000	58	33,164,000	220	unit	99,492,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	342 m2	300 m2	1	36,675,200	1	99,450,000						3	unit	136,125,200.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	342 m2	300 m2				1	104,422,000	1	109,600,000	1	115,125,000	4	unit	329,147,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-			1	100,000,000						2	unit	1,085,000,000.00	Dinhub		
			2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-										3	unit	0.00	Dinhub		
II	Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan Yang Handal	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang			Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Darat				29.14%		32.00%		35.02%		69.86%		39.33%						
					Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat				29.14%		32.00%		35.02%		69.86%		39.33%						
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terseleenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	45.36%	46.90%	47.82%	15,079,000,000	55.09%	10,910,000,000	62.47%	11,940,000,000	69.86%	12,262,000,000	73.19%	12,234,000,000		62,425,000,000.00			
					Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia																		
			2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		0 dokumen		0		0	1	25,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	3	Dokumen	48,000,000.00		
					Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen							1		1		1		3	Dokumen			
			2.15.02.201.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-										3	Dokumen	0.00	Dinhub		
			2.15.02.201.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-				1	300,000,000					3	Dokumen	300,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.201.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-				0						3	Dokumen	0.00	Dinhub		



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
			2.15.02.201.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-				0	1	15,000,000		0		0	3 Dokumen	15,000,000.00	Dinhub	
			2.15.02.201.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	-	-				0							3 Dokumen	0.00	Dinhub	
			2.15.02.201.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	-	-					1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	3 laporan	33,000,000.00	Dinhub	
			2.15.022.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Jenis	57.69%	60.78%	4	12,195,874,800	4	6,454,605,000	4	8,144,125,800	4	6,351,325,000	4	5,912,561,000	20 jenis	20,516,835,600.00		
					Perlengkapan Jalan yang Tersedia	Jenis	57.69%	60.78%	4		4		4		4		4		20 jenis			
			2.15.02.202.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1,311	-	232	6,196,806,800	154	1,591,108,300							386 Unit	7,787,915,100.00	Dinhub	
			2.15.02.202.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1,311	-					844	1,866,355,800	844	1,756,616,000	844	1,134,622,800	2,532 Unit	1,866,355,800.00	Dinhub	
			2.15.02.202.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12 bulan	12 bulan	1254	5,999,068,000	827	4,863,496,700							2,081 Unit	10,862,564,700.00	Dinhub	
			2.15.02.202.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12 bulan	12 bulan					1544	6,277,770,000	1844	4,594,709,000	2144	4,777,938,200	5,532 Unit	15,650,417,200.00	Dinhub	
			2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya Terminal Tipe C	%	50	50	100	307,675,700	100	1,365,791,000	100	494,032,000	100	2,502,842,000	100	572,622,000	100 %	#VALUE!		
					Terminal Tipe C yang Terkelola	%	50	50	100		100		100		100		100		100 %			
			2.15.02.203.01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	1 dokumen												Dokumen		Dinhub	
			2.15.02.203.0001	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	1 dokumen						50,000,000					0 Dokumen	50,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.203.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit					1	1,000,000,000						1 Unit	1,000,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit										2,000,000,000		0 Unit	#VALUE!			
			2.15.02.203.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	12 bulan	12 bulan	3	211,800,000	3	298,819,000						3 Unit	510,619,000.00	Dinhub		
			2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	3						3	311,432,000	3	330,462,000	3	360,462,000	3 Dokumen	1,002,356,000.00		
			2.15.02.203.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		-	3	95,875,700	3	66,972,000						3 Unit	162,847,700.00	Dinhub		
			2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit							3	132,600,000	3	172,380,000	3	212,160,000	3 unit			
			2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terwujudnya Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik	%	73.66	76.79	100	1,391,145,000	100	1,535,925,000	100	1,775,863,200	100	1,727,054,000	100	4,013,738,000	100 %	2,927,070,000.00		
					Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik	%	73.66	76.79	100		100		100		100		100		100 %			
			2.15.02.204.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	1,391,145,000	12	1,535,925,000						24 Laporan	2,927,070,000.00	Dinhub		
			2.15.02.204.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan					12	1,775,863,200	12	1,727,054,000	12	4,013,738,000	36 Laporan	7,516,655,200.00	Dinhub	
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jenis	2	2	2	117,000,000	2	200,000,000	2	255,000,000	2	295,000,000	2	310,000,000	2 jenis	732,000,000.00		
					Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	Jenis	2	2	2		2		2		2		2		2 jenis			

8



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan															Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan																
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			2.15.02.209.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	-	-	4	71,000,000	6	135,000,000							10 Unit	71,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.209.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	-	-					7	160,000,000	8	190,000,000	8	200,000,000	23 Unit	550,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.209.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	46,000,000	12	65,000,000							24 Laporan	111,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.209.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan					12	95,000,000	12	105,000,000	12	110,000,000	36 Laporan	310,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Ditetapkannya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1 jenis																
					Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	Unit																	
			2.15.02.2.12.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-															
			2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-					1	80,000,000		0	1	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Dokumen	-	-						0	1	6,000,000		0	1 Dokumen	6,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/ Kota	jenis	1	1	1	22,000,000	1	25,000,000	1	0	1	0	1	0	1 jenis	47,000,000.00	Dinhub		
					Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/ Kota yang Diterbitkan	jenis	1	1	1		1		1		1		1		1 jenis				
			2.15.02.214.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	22,000,000	12	25,000,000							24 Laporan	47,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.214.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan					12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	36 Laporan	105,000,000.00	Dinhub		
					Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	%	12.30%	12.32%	10.47%		8.90%		7.57%		6.43%		5.47%						
			2.15.02.205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlayannya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	71.16	68.9	100	356,977,700	100	413,679,000	100	432,479,000	100	501,279,000	100	488,079,000	100 %	2,129,553,700.00			
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terlayani	%	71.16	68.9	100		100		100		100		100		100 %				
			2.15.02.205.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	-	1 buah			5	40,000,000							5 Unit	40,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.205.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	-	1 buah					1	35,000,000	4	40,000,000	3	35,000,000	8 Unit	70,000,000.00	Dinhub		
			2.15.02.205.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-		3	11,470,000	3	11,470,000							6 Orang	11,470,000.00	Dinhub		
			2.15.02.205.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-						3	11,470,000	3	11,470,000	3	11,470,000	9 Orang	22,940,000.00	Dinhub		



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan																		
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah						
			2.15.02.205.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	12 bulan	12 bulan	3,100	175,868,700	3,100	183,000,000							6,200	Unit	358,868,700.00	Dinhub			
			2.15.02.205.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	12 bulan	12 bulan					3,100	200,000,000	3,100	225,000,000	3,100	250,000,000	9,300	Unit	675,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	4,000	100,000,000	4,000	100,000,000							8,000	Dokumen	200,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-					4,000	100,000,000	4,000	100,000,000	4,000	100,000,000	12,000	Dokumen	300,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	2	4,855,000	2	5,255,000							4	Laporan	10,110,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-					2	5,655,000	2	6,055,000	2	6,455,000	6	Laporan	18,165,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	19 unit	19 unit	28	53,400,000	28	58,000,000							28	Unit	111,400,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	19 unit	19 unit					28	63,000,000	28	100,000,000	28	65,000,000	28	Unit	228,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	7	11,384,000	7	15,954,000							14	Laporan	27,338,000.00	Dinhub			
			2.15.02.205.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-					7	17,354,000	7	18,754,000	7	20,154,000	21	Laporan	56,262,000.00	Dinhub			
										688,326,800															
			2.15.02.206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas	Laporan	3	3	3	688,326,800	4	896,500,000	7	796,000,000	7	856,000,000	7	906,000,000	15	Laporan	4,142,826,800.00				
					Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Dilaksanakan	Laporan	3	3	3		4		7		7		7		15	Laporan					
			2.15.02.206.01	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3 lokasi	1 lokasi	2	30,998,800	2	40,000,000							4	Laporan	70,998,800.00	Dinhub			
			2.15.02.206.0017	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3 lokasi	1 lokasi					2	40,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	6	Laporan	140,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.206.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas	Unit	-	-			1	90,000,000							1	Unit	90,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen							1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	Dokumen	18,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.206.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan	12	636,000,000	12	731,500,000							24	Laporan	1,367,500,000.00	Dinhub			
			2.15.02.206.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12 bulan	12 bulan					12	750,000,000	12	800,000,000	12	850,000,000	36	Laporan	2,400,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.206.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	7	21,328,000	7	35,000,000							14	Laporan	56,328,000.00	Dinhub			
			2.15.02.206.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-					7	30,000,000	7	35,000,000	7	30,000,000	21	Laporan	95,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Sekolah yang terbangun	Unit							4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	12	Unit	1,200,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan							1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	Laporan	15,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan							1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	Laporan	15,000,000.00	Dinhub			
			2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit							1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	Unit	450,000,000.00	Dinhub			



No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Hasil/Sub Kegiatan	Satuan Target	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan														
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			2.15.02.207	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan					5,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	3	Laporan		
					Hasil Analale Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Disetujui	Laporan												3	Laporan		
			2.15.02.207.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	-	-		3	5,000,000							3	Laporan	5,000,000.00	
			2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	-	-				3	6,000,000	3	6,000,000	3	7,000,000	9	Laporan	19,000,000.00	
			2.15.02.208	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/Kota	laporan					13,500,000	2	11,500,000	2	11,500,000	2	12,000,000	6	laporan	48,500,000.00	
					Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	laporan						2		2		2		6	laporan		
			2.15.02.208.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	-	-		6	10,000,000							6	Laporan	10,000,000.00	Dinhub
			2.15.02.208.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	-	-				6	11,500,000	6	11,500,000	6	12,000,000	18	Laporan	35,000,000.00	Dinhub
			2.15.02.208.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	-	-		2	3,500,000							2	Laporan	3,500,000.00	Dinhub
			2.15.02.208.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	-	-				2	4,500,000	2	4,500,000	2	5,000,000	6	Laporan	14,000,000.00	Dinhub